

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**Oleh:**

Kurniawan M. Manangkalangi

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: aone.m08@gmail.com**ABSTRAK**

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan observasi, wawancara pada bagian keuangan serta mengumpulkan catatan dan dokumen dengan objek yang sedang diteliti yang berhubungan dengan penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian disimpulkan Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan Provinsi Sulawesi Utara dalam menyajikan laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya.

Kata kunci: laporan keuangan daerah, SAP, sumber daya manusia

ABSTRACT

The accounting standard accounting government is the principle set out in the drawing up and presenting the financial report of the government. Government accounting standards will be regulated in government regulation no.24/2005. Local government financial report was an image from the performance of local governments in one of an accounting period. A method of research used is analysis descriptive. Data obtained through field research that is, by creating observation, an interview on the finance and collect records and documents with objects that were being explored that deals with the presentation of the financial report of the north sulawesi province. The result of research shows the region of north sulawesi province had provided financial report based on government regulation no. 24/2005 about government accounting system (SAP). The success of north sulawesi province in presenting the financial report of the region are affected by a factor of supporting human resources and other supporting factors.

Keywords: regional financial report, SAP, human resources

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Bastian (2006:18) menyatakan bahwa sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran system akuntansi keuangan daerah (SIKAD) dengan judul: "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:11) menyatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya yang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:167) menyatakan adapun karakteristik akuntansi sektor publik yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi sektor publik tidak ada laporan laba (*income statemen*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Darise (2008:161) menyatakan bahwa secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Laporan Retrospektif
3. Kelangsungan organisasi
4. Perencanaan dan informasi otorisasi
5. Hubungan masyarakat
6. Sumber fakta dan gambaran

Sistem pencatatan

Halim (2009:42) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran pencatatan dan pengelolaan keuangan dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang, proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan satuan utang.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2009:77) menyatakan bahwa sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Penatausahaan Keuangan Daerah

Mahmudi dalam forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2007:20) menyatakan bahwa selama masa pra otonomi daerah dan desentralisasi fisik belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Yang ada baru sebatas tatabuku pengelolaan daerah berdasarkan pada buku manual administrasi keuangan daerah tahun 1981 yang pada esensinya tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tatabuku.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu presiden RI telah menetapkan keputusan presiden No 84 Tahun 2004 tentang komite standar akuntansi pemerintahan atau (KSAP), sebagaimana diubah dengan keputusan presiden No 2 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akruwal yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akruwal.

Lingkungan Yang Mempengaruhi

Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan eksternal dan internal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah keefektifan transparansi dan pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang di limpahkan kepadanya.

Tabel 1. Perbandingan PP No.24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL Tidak ada laporan tersendiri</p> <p>NERACA Ekuitas Dana terbagi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih • Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang • Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) <p>Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran</p> <p>LAPORAN KINERJA KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersifat optional • Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual • Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos : <p>a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; c) Surplus atau defisit.</p> <p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersifat optional • Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: <p>a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah .</p> <p>CALK Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru.</p>	<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir. <p>NERACA Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas</p> <p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris <p>LAPORAN OPERASIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Laporan Keuangan Pokok • Menyajikan pos-pos sebagai berikut: <p>a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO.</p> <p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Laporan Keuangan Pokok • Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: <p>a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir.</p> <p>CALK Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Halim (2009:18) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No 24 Tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Halim (2009:20) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2007:81) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Komite standar akuntansi pemerintahan (2007:10) menyatakan bahwa keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang perlu dilakukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Unsur-unsur keuangan pemerintah daerah

Unsur laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan



Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Sinaga	2007	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Blitar)	Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ini menunjukan Bahwa Faktor Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan <i>good governance</i> , Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen <i>good governance</i> yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	- Dalam jurnal yang ditulis oleh Jamason Sinaga SAP merupakan Variabel Y sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan SAP merupakan Variabel X. - Lokasi/ tempat Penelitian, Instansi yang diteliti.	Penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2	Aryani	2008	Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Transaksi keuangan pemerintah dan laporannya pun adalah laporan keuangan dengan format khusus untuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ini hanya mengatur pengakuan, penilaian, dan pengungkapan.	- Variabel Y yang digunakan oleh peneliti Farida Aryani adalah Pelaporan Keuangan. - Lokasi/ tempat Penelitian, Instansi yang diteliti.	Penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2007:125) menyatakan bahwa Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek Yang akan diteliti dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini lebih banyak data secara kualitatif berupa keterangan dan uraian.

Tempat dan waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor gubernur, dan waktu penelitian dari bulan maret sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang ditempu dalam upaya prosedur penelitian untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari penyajian laporan keuangan daerah yang diterapkan pada bagian keuangan.
2. Memahami penyajian laporan keuangan daerah di provinsi sulawesi utara.
3. Melakukan analisis terhadap penyajian laporan keuangan dalam kaitannya dengan Permendagri No 13 tahun 2006 adalah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Metode Analisis

Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi sulawesi utara dilakukan oleh bagian keuangan. Bagian ini merupakan salah satu bagian yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara langsung dikoordinasikan oleh Biro Keuangan Dan aset dan Asisten Administrasi umum sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing.

Prosedur keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimulai pada saat anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sahkan oleh DPRD. Berdasarkan APBD yang disahkan oleh sub bagian Anggaran membuat Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pemerintah dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. SPP yang diajukan oleh setiap satuan kerja akan di verifikasi oleh Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Anggaran.

Penyajian laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaporan keuangan Daerah berpedoman pada Permendagri No 13 tahun 2006 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Arus kas, Laporan Realisasi/Perhitungan APBD, Neraca dan Perhitungan Anggaran.

Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan daerah pemerintah provinsi sulawesi utara terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja menyajikan laporan keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Tabel 3. Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean

Lama	Baru
Srukturunya terdiri: Pasal dan Ayat	Strukturunya terdiri dari : rekening
Strukturunya tidak standar	Strukturunya standar berbasis financial statistic
Terpisah-pisah dan berorientasi pada pos-pos belanja dan pendapatan	Intergrated, meliputi rekening, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pos-pos neraca
Numeric dan Alphabetic	Numeric

Sumber data: Kepmendagri No 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No 24

Tabel 4. Akun

Kepmendagri No 29 Tahun 2002	SAP
Pendapatan	Aset
Belanja	Kewajiban
Pembiayaan	Ekuitas dana
Aktiva	Pendapatan
Utang	Belanja
Ekuitas	Pembiayaan Daerah

Sumber data: Kepmendagri No 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005

Tabel 5. Struktur Realisasi Anggaran

Kepmendagri No 29 Tahun 2002	SAP
Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja	Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja
Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur dan pelayanan publik	Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatan
Pengelompokan BAU.BOP dan BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpangtindih penganggaran	Belanja dikelompokkan belanja operasi, belanja modal, belanja takterduga, sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat penganggaran
Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja	Restrukturisasi jenis-jenis belanja

Sumber data: Kepmendagri No 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005

Pembahasan

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2011 ini di susun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.

2. Neraca

Neraca daerah merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir anggaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya kedalam pos-pos neraca.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus kas masuk dan arus keluarnya kas pada pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun anggaran 2011. Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas antara lain:

1. Aktivitas operasi
2. Aktivitas investasi
3. Aktivitas Pembiayaan
4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tahun anggaran 2011, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah sesuai pada SAP No.24 tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri 13 tahun 2006. Namun dalam nama hal Laporan Realisasi Anggaran dan nama Laporan Arus Kas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih menggunakan nama laporan yang ditentukan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2011 belum menyajikan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu. Walaupun pada laporan keuangan tersebut di buat pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011, tetapi pada kenyataannya baru selesai disusun atau disahkan pada akhir juli 2012, yang menurut ketentuan seharusnya di sahkan pada 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
3. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih menggunakan bantuan tenaga konsultan dan pendampingan dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah, yang membutuhkan waktu lama dalam mensosialisasikan kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan daerah.

Saran

Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangan daerah berpedoman sepenuhnya pada standar akuntansi pemerintahan, dan hendaknya kinerja pemerintah daerah provinsi sulawesi utara dapat lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang aman, dan kondusif sehingga tuntunan masyarakat yang menghendaki transparansi,akuntabilitas,dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2008. Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Bastian. Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Darise. Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks. Jakarta.
- _____. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks. Jakarta.
- Halim. Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro. Mudrajad. 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi II. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Sinaga. Jamason. 2007. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- _____. 2002. Kepmendagri Nomor 29 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Jakarta.